



Efektivitas Program Bali Satu Data Dalam Upaya Keterbukaan Informasi di Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Bali

Eka Aprilia^{*a}, Ni Putu Anik Prabawati^a, Juwita Pratiwi Lukman^a

^a Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

* Correspondence: ekaaprilialia0422@gmail.com

Abstract

This research aims to determine the effectiveness of the Bali Satu Data program in efforts to open information at the Bali Province Communication, Information and Statistic Service. The problem assessment was carried out using the theory of program effectiveness by Budiani (2007). This research is a type of descriptive qualitative research. Determining informants was carried out using a purposive sampling technique. Researchers obtained data by conducting interview, observation and documentation which were then analyzed using the Miles and Huberman analytical model. The result of the research show that the effectiveness of the Bali Satu Data program in efforts to open information has been running quite optimally by meeting the target accuracy indicators and program monitoring indicators well, as evidenced by the number of website visitors on launching day reaching 6 thousand visits and the program monitoring efforts being carried out optimally for the media. Providing services as well as operational monitoring of all devices involved in the program implementation process. In terms of program socialization, it has been implemented but not consistently and sustainably so that the fulfillment of indicators is good but not yet optimal. Furthermore, the indicators for achieve goals have not been implemented properly because the implementation of rules or SOPs in the field has not been implemented properly.

Keywords: effectiveness, information openness, Bali Satu Data, Bali Province

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas program Bali Satu Data dalam upaya keterbukaan informasi di Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Bali. Pengakajian permasalahan dilakukan dengan teori efektivitas program oleh Budiani (2007). Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penentuan informan dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Peneliti memperoleh data dengan melakukan wawancara, observasi serta dokumentasi yang kemudian dianalisis menggunakan model analisis Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan efektivitas program Bali Satu Data dalam upaya keterbukaan informasi telah berjalan cukup optimal dengan memenuhi indikator ketepatan sasaran dan indikator pemantauan program dengan baik, dibuktikan dengan jumlah pengunjung website saat hari launching mencapai 6ribu kunjungan dan upaya pemantauan program yang dilaksanakan secara optimal baik untuk media pemberian layanan maupun secara pemantauan operasional terhadap seluruh perangkat yang terlibat dalam proses pelaksanaan program. Dalam hal sosialisasi program sudah terlaksana namun belum secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pemenuhan indikator sudah baik namun belum optimal. Selanjutnya, dalam indikator pencapaian tujuan yang belum dapat terlaksana dengan baik karena pelaksanaan aturan atau SOP di lapangan belum dapat terlaksana dengan baik.

Kata kunci: efektivitas, keterbukaan informasi, Bali Satu Data, Provinsi Bali

Pendahuluan

Negara Republik Indonesia menganut sistem demokrasi yang memiliki arti Dari Rakyat, Oleh Rakyat dan Untuk Rakyat sehingga rakyat memegang kekuasaan tertinggi. Konsep ini pula yang digunakan dalam memberikan pelayanan publik. Pelayanan publik yaitu memberikan layanan (melayani) keperluan masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan (Mukaron dan Laksana, 2016:41). Dalam hal ini, sebuah negara di didirikan oleh masyarakat sehingga dibutuhkan pelayanan yang baik sesuai dengan aturan dan tata cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya penyelenggara pemerintah dalam pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat yang dilakukan oleh para birokrasi publik dalam pemenuhannya (Sinambela, 2006:5). Dari berbagai pemaparan pendapat dan penjelasan dari pengertian pelayanan publik diatas, maka

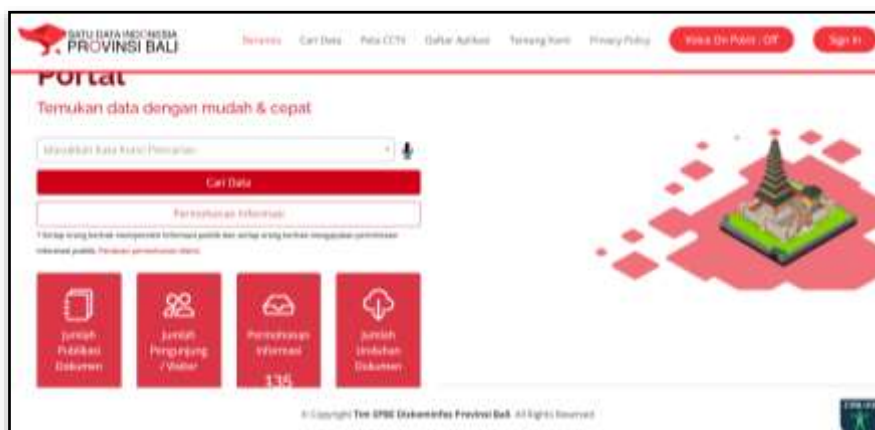
pelayanan publik merupakan pemberian hak dasar kepada seluruh warga negara atau masyarakat luas sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya yang telah diatur dalam perundang – undangan.

Salah satu bentuk upaya pelayanan publik ialah keterbukaan informasi data sebagai bukti pemberian hak kepada masyarakat mengenai informasi di lingkup pemerintah. Data terbuka merupakan data yang dapat diakses dan dimanfaatkan secara bebas hingga dipublikasikan kepada siapapun dengan keharusan menyebutkan sumber data yang digunakan dan berbagai lisensi yang sama. Dengan adanya data terbuka, membuat akses para pengguna lebih mudah untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, data tersebut juga dapat disebarluaskan dengan sistem yang transparan, selain itu data terbuka juga memungkinkan partisipasi antar pemerintah, masyarakat, dan swasta untuk bekerja sama dalam mendorong inovasi.

Inovasi dalam pelayanan publik pada era dimana teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah. Masyarakat kini memiliki tuntutan besar terhadap pemerintah sebagai pemberi layanan publik untuk lebih terbuka, efektif dan efisien dalam melakukan tugasnya serta memberikan kemudahan terhadap akses informasi khususnya informasi mengenai pemerintah. Penerapan teknologi informasi dalam pelaksanaan pemerintahan, telah diatur dalam intruksi Presiden Republik Indonesia No.3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, “Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup 2 aktivitas yang berkaitan yaitu: 1). Pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik, 2). Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara”. Sesuai dengan Inpres RI tersebut maka tujuan pemerintah menerapkan sistem e-government ialah membantu pelaksanaan pelayanan publik menjadi lebih efektif dan juga mendukung keterbukaan informasi kepada seluruh masyarakat.

Dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkup Pemerintahan Provinsi Bali menyatakan bahwa perangkat pemerintahan dibawah lingkup Provinsi Bali tidak diperkenankan memiliki aplikasi layanan publik secara mandiri dan harus berada di bawah satu payung informasi. Oleh karena itu, dibuatlah kebijakan tentang Sistem Bali Satu Data, dimana sistem ini merupakan turunan dan bentuk dukungan kepada sistem Satu Data Indonesia di wilayah Provinsi. Pelaksanaan Sistem Bali Satu Data berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Bali No.53 Tahun 2021 tentang Satu data Indonesia Tingkat Provinsi. Bali Satu Data ini tersedia dalam bentuk website dan diakses menggunakan jaringan internet.

Gambar 1 Website Sistem Informasi Bali Satu Data



(Sumber: Website Bali Satu Data, 2023)

Gambar 1. Menunjukkan tampilan beranda website Bali Satu Data yang dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Bali. Dalam Website tersebut, masyarakat dapat mencari, mengunduh dan melakukan permohonan data secara legal dan kredibel karena data yang disajikan berasal dari produsen data yang tepat dan disajikan dalam satu format. Website Bali Satu Data juga berfungsi sebagai wadah bagi aplikasi-aplikasi pendukung pelaksanaan pelayanan publik di Provinsi Bali. Daftar aplikasi yang terdapat dalam website Bali Satu Data antara lain: Sikuat, Love Bali, Bali Media Center, Hadir, Satgas Desa, Pendataan Covid,

Online Data Koperasi Bali, Office UMKM/IKM, Sipenda Cantik, SIK BPBD Provinsi Bali, SiGapura, Data Sektoral, E-Riset Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali, E-Prestise, Polda Bali, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali, Simpelkan, Jidhat dan JDIH.

Bali Satu Data ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam keterbukaan informasi yaitu dengan adanya fitur publikasi, permohonan dan kemudahan untuk mengunduh dokumen. Dokumen – dokumen yang dimaksud berisikan laporan-laporan publik yang bersifat publik dan telah diolah serta disajikan dengan format yang ditetapkan. Fitur publikasi ini dipergunakan untuk mengolah dan mendistribusikan data serta informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat sesuai tujuan yang diinginkan. Upaya keterbukaan informasi ini dapat menjadi sebuah pendekatan yang pengelolaan data untuk mendorong pembangunan berkelanjutan. Keterbukaan informasi bernilai dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan efisiensi dan cakupan pelayanan publik, meningkatkan transparansi akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat serta memfasilitasi pembagian informasi yang lebih baik di dalam pemerintahan.

Tabel 1.1 Data Penggunaan Website Bali Satu Data 2021-2023

NO	Data Tahun 2021-2023	Jumlah
1	Publikasi Dokumen	1.978 dokumen
2	Pengunjung/ Visitor	76.410 kunjungan
3	Permohonan Informasi	480 permohonan
4	Unduhan Dokumen	5.619 unduhan

(Sumber: Website Bali Satu Data,2023)

Data tersebut merupakan data umum penggunaan website Bali Satu Data dari tahun 2021-2023 terkait distribusi dokumen dan informasi. Data tersebut dapat dilihat dalam halaman pertama website sehingga dapat menjadi gambaran kredibilitas dan efektivitas penggunaan sistem Bali Satu Data. Dokumen yang disajikan berasal dari data OPD yang bekerjasama dengan Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Bali melalui Website Bali Satu Data. OPD yang terlibat akan diberikan akses langsung kedalam sistem untuk mengunggah dan mengelola data mengenai instansinya masing-masing melalui aplikasi yang terdapat dalam website Bali Satu Data

Tujuan dari pembuatan fitur publikasi aplikasi Data Sektoral dalam website Bali Satu Data ini untuk mendukung sistem turunannya yaitu Satu Data Indonesia, sebagai pedoman pelaksanaan dan acuan bagi Instansi Pusat dan juga Instansi Daerah dalam pengelolaan data-data, penyediaan data yang berkualitas dikarenakan sebelum di publikasikannya suatu data harus dipastikan bahwa data tersebut akurat dan reabilitas, adanya kemudahan dalam akses dan dibagi pakaikan antar Instansi, transparansi sistem dan data statistik Provinsi Bali yang mencerminkan iklim kerja para pelayan publik yang transparan dan dapat dipercaya sehingga dapat membangun kepercayaan masyarakat umum kepada para pelayan publik. Tujuan lainnya dari adanya Bali Satu Data ini ialah sebagai upaya dalam digitalisasi pelayanan publik untuk penyediaan data terutama untuk data terbuka.

Upaya keterbukaan informasi pelayanan ini nyatanya masih memiliki beberapa permasalahan dalam implementasi di lapangan. Terdapat dua permasalahan utama dari pelaksanaan Sistem Bali Satu Data ini yaitu dari sisi instansi pengelola dan dari sisi pemanfaatannya. Pengelolaan dan pemanfaatan adalah dua hal yang berkaitan mengenai efektivitas karena dengan adanya pengelolaan yang baik maka program yang digagas atau dijalankan dapat secara maksimal memberikan pelayanan kepada publik. Pemanfaatan yang baik oleh masyarakat juga mempengaruhi efektivitas suatu program karena jika hanya pemaksimalan program tanpa ada usaha pemanfaatan maka target yang sudah ditentukan tentunya tidak dapat tercapai.

Permasalahan dalam sisi pelaksanaan fitur meliputi permasalahan pergantian pegawai yang memiliki tanggung jawab sebagai oprator dalam penyediaan data di setiap instansi, publikasi data yang tidak sesuai format dan jadwal rilis dokumen yang tidak sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Pergantian pegawai merupakan permasalahan yang tidak dapat dihindari oleh setiap instansi karena setiap individu memiliki haknya masing-masing dalam menjalankan kehidupan bekerjanya, tetapi hal ini tentunya akan mengganggu tatanan yang telah ada karena posisi yang ditinggalkan harus digantikan oleh pegawai baru. Publikasi data yang tidak sesuai dengan format yang ditentukan merupakan permasalahan yang berasal dari instansi yang

terlibat yang tentunya akan menghambat data atau doumen tersebut tersampaikan kepada publik karena data yang tidak sesuai dengan format akan dikembalikan ke instansi terkait untuk perbaikan. Jadwal rilis data yang tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan tentunya merupakan sebuah permasalahan karena telah melanggar aturan yang telah ditetapkan dan menghambat publikasi data tersebut. Sedangkan permasalahan dari sisi pemanfaatan adalah bagaimana program ini berjalan di masyarakat dan mencapai target. Antusiasme masyarakat yang rendah dikarenakan masih meragukan akuntabilitas dari sistem Bali Satu Data sehingga lebih memilih untuk datang langsung ke instansi yang dituju karena akan merasa lebih dilayani. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi oleh pihak pengelola secara konsisten dan menerus sehingga tidak semua masyarakat sebagai sasaran mengetahui mengenai program yang dijalankan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif (sugiyono, 2016) untuk mengeksplorasi efektivitas sistem Bali Satu Data dalam upaya digitalisasi pelayanan publik. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur dan penelitian terdahulu. Unit analisis utama adalah Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik Provinsi Bali.

Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling (sugiyono, 2013)dengan mengutamakan mereka yang terlibat langsung dan memiliki pengetahuan terkait. Informan utama termasuk Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Bali, serta kepala bagian terkait lainnya. Masyarakat pengguna dan non-pengguna portal Bali Satu Data juga diikutsertakan.

Peneliti sendiri merupakan instrumen utama dalam penelitian ini, bertanggung jawab mulai dari menentukan fokus penelitian, pemilihan informan, hingga analisis data. Teknik pengumpulan data meliputi observasi terang-terangan, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi.

Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan merangkum hal-hal penting dan mencari pola temuan. Data disajikan dalam bentuk naratif, tabel, dan gambar untuk mempermudah pemahaman. Penarikan kesimpulan dilakukan setelah ditemukan bukti-bukti dan data pendukung yang valid.

Keseluruhan proses penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai efektivitas sistem Bali Satu Data dalam digitalisasi pelayanan publik di Provinsi Bali, dengan harapan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan dan praktik pelayanan publik yang lebih baik.

3. Hasil dan Pembahasan

Tabel 2. Rangkuman Hasil Temuan Efektivitas Program Bali Satu Data Dalam Upaya Keterbukaan Informasi di Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Bali

No	Indikator	Hasil Temuan
1.	Ketepatan Sasaran Program	Indikator ketepatan sasaran program pada Efektivitas Program Bali Satu Data Dalam Upaya Keterbukaan Informasi di Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Bali terbagi menjadi: Penggolongan akses pengguna Program Bali Satu Data dalam pemanfaatan keterbukaan informasi dengan tujuan pemanfaatan dapat sesuai dengan kebutuhan dan kegunaan. Keberhasilan dalam menjangkau sasaran program yang dapat dilihat dari kunjungan website saat rilis mencapai 6ribu hingga data terakhir pada tahun 2023 sebanyak 76.410 kali kunjungan website. Pembentukan team pelaksana program yang memiliki tugas dari perencanaan, pelaksanaa, pemantauan dan evaluasi program

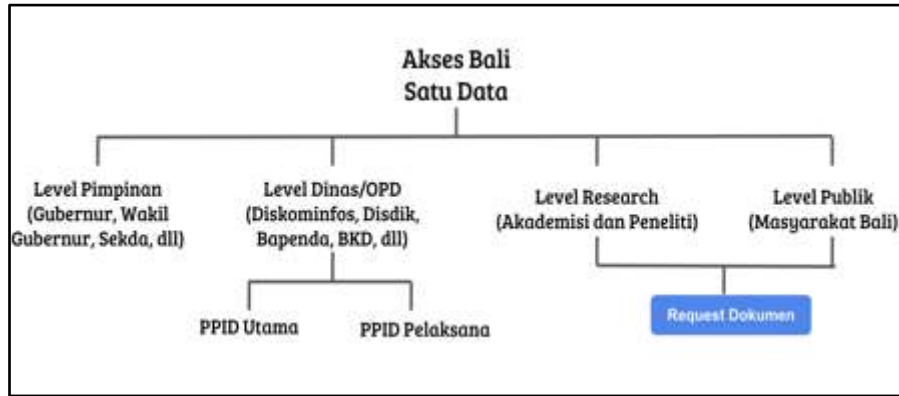
2.	Sosialisasi Program	Indikator sosialisasi program pada Efektivitas Program Bali Satu Data Dalam Upaya Keterbukaan Informasi di Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Bali terbagi menjadi: Pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat dengan cara webinar online dan pembuatan akun media sosial instagram. Sosialisasi dilaksanakan via online sehingga memudahkan dalam akses dan dapat mencakup jangkauan yang luas. Pelaksanaan sosialisasi kepada instansi pemerintahan sebagai media audiensi dan jembatan kerjasama dalam pelaksanaan program karena seluruh instansi pemerintahan terlibat dalam pengelolaan. Pelaksanaan sosialisasi tidak dapat berjalan dengan konsisten dan berkelanjutan sehingga belum seluruh sasaran mengetahui informasi mengenai program yang berjalan. Pendekatan sosialisasi kurang tepat karena tidak bersifat menyasar langsung kepada sasaran.
3.	Pencapaian Tujuan Program	Indikator pencapaian tujuan program pada Efektivitas Program Bali Satu Data Dalam Upaya Keterbukaan Informasi di Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Bali terbagi menjadi: Dibuatnya SOP bagi OPD selaku produsen atau penyedia data sehingga dalam pelaksanaan program berjalan dengan baik. Sistem pengelolaan data atau informasi antar instansi sudah berkembang yang awalnya secara manual menjadi online sehingga pelaksanaan layanan keterbukaan informasi ke masyarakat dapat dilakukan lebih efektif dan efisien. Hal tersebut juga memudahkan para pengelola data dengan sistem yang berbasis online. Dalam pemberian layanan penyediaan data bagi masyarakat yang melakukan permohonan data memakan waktu yang cukup lama. Hal tersebut jelas dapat menghambat pelayanan mencapai keefektifannya.
4.	Pemantauan Program	Indikator pemantauan program pada Efektivitas Program Bali Satu Data Dalam Upaya Keterbukaan Informasi di Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Bali terbagi menjadi: Pemantauan dilaksanakan dari proses perancangan hingga pelaksanaan program. Dilakukan beberapa uji sebelum aplikasi rilis untuk mengurangi <i>error</i> saat telah digunakan. Dilaksanakan juga pemantauan mengenai website dengan bekerjasama dengan Badan Cyber dan Sandi Negara untuk memeriksa kerentanan website yang dilakukan 6 bulan sekali. Pemantauan dilakukan juga terhadap seluruh instansi yang terlibat dalam pengelolaan program terutama OPD selaku pihak penyedia data yang harus di rilis. Jika terdapat kendala maupun tindakan diluar aturan, Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik akan melakukan pemanggilan untuk dilakukan mediasi.

Pembahasan

Ketepatan Sasaran

Menurut Budiani (2007) sasaran dalam hal ini adalah tujuan yang ingin yang capai oleh suatu organisasi atau program. Ketepatan sasaran mengarah pada sejauh mana peserta program sesuai dengan terget sasaran yang telah di tentukan. Dalam hal ini sasaran program keterbukaan informasi dalam website Bali Satu Data menyasar pada seluruh lapisan masyarakat di Provinsi Bali baik dari tingkat pemerintahan pusat hingga masyarakat umum.

Gambar 2. Akses Bali Satu Data



Sumber: Diolah Penulis

Pengelompokan akses program keterbukaan informasi dalam website Bali Satu Data ini didasarkan pada fungsi dan tujuan dalam penggunaan informasi. Hal ini bertujuan untuk menyesuaikan kebutuhan layanan keterbukaan informasi di Provinsi Bali. Ketepatan sasaran program keterbukaan informasi dalam website Bali Satu Data dapat diketahui dari keberhasilan dalam merealisasikan program dan melaksanakan seluruh kegiatan untuk mendukung ketepatan sasaran program. Keberhasilan ketepatan sasaran program ini ditandai dengan antusiasme dari masyarakat untuk menggunakan layanan keterbukaan informasi dalam website Bali Satu Data yang tergolong tinggi dan terus meningkat yakni pada 2021 saat launching 6 ribu pengunjung sedangkan pada data terakhir di tahun 2023 sebanyak 76.410 kunjungan dan didukung dengan 480 permohonan dokumen dan 5.619 unduhan dokumen sebagai bentuk antusiasme masyarakat dalam memanfaatkan website Bali Satu Data. Hal ini membuktikan bahwa ketepatan sasaran program Bali Satu Data dalam upaya keterbukaan informasi di Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Bali dapat dikatakan baik.

Sosialisasi Program

Sosialisasi dimaksudkan untuk menyebar luaskan informasi mengenai pelaksanaan program. Sosialisasi ini lebih memfokuskan pada instansi terkait sebagai pihak pelaksana sehingga dapat memberikan informasi secara menyeluruh kepada seluruh masyarakat terutama yang menjadi targetnya. Sosialisasi merupakan proses penyampaian sesuatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberi tahu atau mengubah sikap, pendapat, perilaku baik langsung maupun tidak langsung, Gunawan (2012:198). Sosialisasi merupakan proses mengkomunikasikan program-program pemerintah kepada masyarakat, dengan tujuan untuk memberikan pengenalan dan pengantar dalam lingkup luas. Dalam upaya meningkatkan efektivitas pelayanan keterbukaan informasi publik di Provinsi Bali tentunya dibutuhkan upaya sosialisasi kepada masyarakat sebagai langkah awal pengenalan program. Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Bali telah melakukan beberapa upaya dalam melaksanakan pendekatan kepada masyarakat dengan menggunakan kemajuan teknologi berupa media sosial. Program Bali Satu Data memiliki akun instagram (@balisatudata) akan tetapi dalam pengelolaan media sosial tersebut belum maksimal, dimana hanya terdapat 3 postingan saja dengan postingan terakhir pada 15 Juli 2022. Selain akun instagram Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Bali (@diskominfo_bali) juga tidak selalu menampilkan informasi mengenai pelayanan keterbukaan informasi ini karena fungsi utama dari media tersebut adalah mempublikasikan seluruh kegiatan di Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Bali. Selain dengan dibuatkan akun media sosial, Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Bali juga melakukan sosialisasi dengan mengadakan webinar dengan tema “Keterbukaan Informasi Publik. Implementasi Perki Nomor 1 Tahun 2021. Sosialisasi Website: balisatudata.baliprov.go.id” melalui akun Youtube Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Bali (@Diskominfo Bali). Namun seluruh upaya sosialisasi yang dilakukan kurang dapat terlaksana dengan maksimal karena tidak dilakukan dengan konsisten dan manajemen yang baik. Adanya hal tersebut membuktikan bahwa indikator sosialisasi program Bali Satu Data dalam upaya keterbukaan informasi di Provinsi Bali masih kurang optimal.

Pencapaian Tujuan

Sejalan dengan ketepatan sasaran program maka dibutuhkan pula pencapaian tujuan program untuk dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan program. Indikator ini memfokuskan kesesuaian antara pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan. Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit, Duncan dalam Ricard M. Steers (2003). Dalam hal ini Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Bali melakukan upaya dalam hal pembuatan aturan kerja atau SOP. SOP tersebut diterapkan kepada OPD selaku produsen data sebagai landasan aturan dalam bekerja dan kepada masyarakat dalam pemanfaatan layanan. Pembuatan SOP tersebut berujuan agar seluruh kegiatan pelayanan keterbukaan informasi dari proses pengelolaan hingga pemanfaatan berjalan dengan baik sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Hal ini juga didukung dengan upaya digitalisasi pelayanan. Digitalisasi layanan ini tentunya akan mempermudah pemberian layanan kepada masyarakat sehingga tujuan keterbukaan informasi dapat dicapai dengan lebih efektif dan efisien. Namun hal tersebut nyatanya belum berjalan dengan baik, walaupun telah diterapkan SOP bagi pengelola maupun pihak pengguna nyatanya waktu pemberian layanan ini tergolong cukup lama lebih dari 14 hari kerja. Hal lain yang membuat pencapaian target ini belum maksimal dilakukan ialah bahwa layanan ini hanya dapat diakses dengan penggunaan jaringan internet sehingga bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses kurang dapat ikut menggunakan layanan keterbukaan informasi ini. Adanya hal tersebut disimpulkan bahwa pencapaian target program Bali Satu Data dalam upaya keterbukaan informasi di Provinsi Bali belum berjalan dengan baik.

Pemantauan Program

Saat program sedang terlaksana tentunya dibutuhkan pemantuan dan evaluasi setelah program berjalan. Hal ini merupakan bentuk perhatian dan tanggung jawab untuk menindak lanjuti penyelenggaraan program kepada seluruh peserta program. Pemantauan sebagai proses pengamatan daripada pelaksanaan semua kegiatan organisasi untuk memastikan bahwa semua pekerjaan yang dilakukan adalah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, P. Siagian (1970:107). Dalam hal ini Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Bali melakukan pemantauan program sejak proses pembuatan program hingga penggunaan bagi masyarakat. Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Bali melakukan beberapa uji program sebelum di publish. Hal ini juga berlaku bagi seluruh aplikasi yang berada di bawah naungan website Bali Satu Data yang bertujuan meminimalisir *error system* saat website digunakan. Hal ini didukung dengan adanya kerjasama dengan Badan Cyber dan Sandi Negara dalam hal *Cyber Security* yaitu pengecekan kerentanan program dalam kurun waktu setiap 6 bulan. Selain melakukan pemantauan dalam hal digital, Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Bali juga melakukan pemantauan kepada seluruh OPD yang bekerjasama dalam proses pelaksanaan program. Sehingga jika terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan maka akan dilakukan tindakan. Adanya hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemantauan progra Bali Satu data dalam upaya keterbukaan informasi di Provinsi Bali dapat dikatakan sudah baik.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil temuan dan analisan yang telah dikumpulkan oleh peneliti mengenai efektivitas layanan keterbukaan informasi dalam program Bali Satu Data di Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Bali telah berjalan dengan baik, namun terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan untuk meminimalisir hambatan maupun kendala dalam pelaksanaannya. Melalui wawancara dan observasi yang telah dilakukan, maka peneliti dapat memberikan rekomendasi. Rekomendasi ini dapat dijadikan bahan pertimbangan terhadap pihak pengelola program. Adapun rekomendasi yang dapat peneliti berikan, yaitu:

1. Perlu dibuatkan sistem kerja yang konsisten bagi seluruh pihak pengelola terutama bagi operator pada setiap OPD yang bekerjasama dengan Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Bali. Dengan adanya sistem kerja atau SOP paten maka sistem kerja akan tetap konsisten walaupun pengelola atau operator mengalami pergantian. Hal lainnya yang dapat dilakukan adalah

mengadakan pelatihan kembali untuk seluruh operator baru dalam kurun waktu tertentu sehingga, operator pengganti tetap memiliki kualifikasi yang memadai.

2. Perlu adanya aturan oprasional dalam pemenuhan permohonan data dari segi waktu. Dengan adanya aturan jangka waktu sehingga memberikan target kepada OPD selaku produsen data dalam menyiapkan data yang dibutuhkan. Pemberian layanan dengan waktu seminimal mungkin dapat menjadi faktor efektivitas suatu program.
3. Perlu adanya upaya preventif yaitu melakukan *reminder* kepada seluruh OPD yang menjadi produsen data yang telah memiliki jadwal rilis data, sebagai upaya meminimalisir keterlambatan publikasi data. Selain itu, dapat dilakukan rapat koordinasi dalam kurun waktu tertentu sebagai upaya pencegahan jika terdapat kendala dalam publikasi data. Dalam upaya penanganan keterlambatan maka dilakukan pemanggilan kepada OPD yang memiliki hambatan dalam publikasi data.
4. Perlu dilakukan kerjasama yang lebih dalam dengan instansi daerah. Kerjasama yang dilakukan bertujuan untuk membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam mengakses layanan sehingga dapat diwakilkan oleh instansi daerah yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Instansi daerah juga dapat menjalankan fungsi sosialisasi kepada masyarakat sekitar.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian yang diperoleh mengenai Efektivitas Program Bali Satu Data dalam Upaya Keterbukaan Informasi di Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Bali berjalan cukup baik namun masih belum optimal. Pernarikan kesimpulan yang dilakukan disesuaikan berdasarkan hasil analisis teori Efektivitas Program menurut Budiani (2007). Analisis dilakukan berdasarkan lima indikator, yaitu: 1) ketepatan sasaran; 2) sosialisasi program; 3) pencapaian tujuan program; serta 4) pemantauan program. Adapaun kesimpulan yang diperoleh berdasarkan masing-masing indikator yaitu:

1. Indikator ketepatan sasaran program Bali Satu Data dalam upaya keterbukaan informasi dapat diketahui telah terpenuhi. Hal ini dilihat dari 76.410 kunjungan website dari tahun 2021-2023 yang mencerminkan bahwa website ini dibergunakan dengan baik oleh sasaran program. Selain itu, dengan adanya penggolongan yang telah ditetapkan sejak perancangan program sehingga pihak pengelola mengetahui dengan pasti siapa saja target sasaran dari program yang dijalankan.
2. Indikator sosialisasi program Bali Satu Data dalam upaya keterbukaan informasi dapa dikatakan belum dapat berjalan dengan baik. Walaupun kegiatan sosialisasi telah dilakukan tetapi tidak dilaksanakan dengan konsisten dan berkelanjutan sehingga belum seluruh sasaran mengetahui terakait program yang dijalankan.
3. Indikator pencapaian tujuan program Bali Satu Data sudah baik, dengan pemberian layanan berbasis digital atau online tetapi dalam hal penyediaan data kepada pemohon data masih membutuhkan waktu yang cukup lama.
4. Indikator pemantauan program Bali Satu Data dalam upaya keterbukaan informasi sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dengan upaya Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik Provinsi Bali yang melakukan beberapa uji dalam perancangan aplikasi atau website hingga melakukan *maintenance* dalam kurun waktu tertentu terhadap kerentanan website dengan berkerjasama dengan pihak yang memiliki kualifikasi di bidangnya. Hal lain yaitu melakukan pemantauan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan program sehingga seluruh tatanan kerja dapat berjalan dengan baik.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian mengenai efektivitas program Bali Satu Data dalam upaya keterbukaan infomasi di Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Bali, maka peneliti dapat memberikan saran yang mana diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dari pelaksanaan program, yakni sebagai berikut:

1. Kepada pihak pengelola yaitu Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Bali dan seluruh OPD yang terlibat dalam proses pelaksanaan program diharapkan dapat melakukan peningkatan upaya-upaya dalam optimalisasi pelaksanaan program. Upaya optimalisasi dapat dilakukan oleh pihak pengelola utama yaitu Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Bali dalam hal peraturan kebijakan lalu oleh pihak pembantu dalam pelaksana yaitu seluruh OPD yang terlibat dalam hal peningkatan kinerja. Seluruh upaya optimalisasi tersebut jika dapat dilakukan secara baik dan sejalan tentunya akan mendekatkan pelaksanaan program
2. Bagi seluruh masyarakat Provinsi Bali selaku sasaran program, diharapkan dapat lebih berpartisipasi dan memiliki rasa antusias dalam pemanfaatan program keterbukaan informasi ini. Dengan dukungan yang diberikan oleh seluruh masyarakat akan memberikan dampak baik dalam hal partisipasi di lingkup pengambilan keputusan pemerintah mengenai kebijakan atau program bagi masyarakat itu sendiri.
3. Bagi peneliti lain, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini agar dapat menciptakan temuan yang semakin optimal berdasarkan pada perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan.

Daftar Pustaka

- Agung, Kurniawan. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaharuan.
- Agus, Widarjono. 2007. *Ekonometrika Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Ekonisia FE UII.
- Arikunto, S. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Ash Shiddieqy, M. Hasbi. 2007. *Rancangan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Studi Kasus Pamarintahan Kabupaten Bima-NTB)*. Universitas Islam Malang: UNISMA
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/10/apjii-penetrasi-internet-indonesia-capai-7702-pada-2022> pada 23 November 2023
- Bali satu Data. Diakses dari <https://balisatudata.baliprov.go.id/> pada 15 September 2023
- Budiani, N. W. 2009. Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna 'Eka Taruna Bhakti' Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar.2, 49–57.
- Islami, Maulia Jayantina. (2021). Implementasi Satu Data Indonesia: Tantangan dan Critical Succes Factors (CSFs). Jurnal Komunikasi, Media dan Informatika, 10 (1).
- J. Moleong, Lexy.2014. *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Kuncorowati, Rita Margaretha., & Winarni, Aris Toening. (2021). Implementasi Solo Satu Data Sebagai Basis Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta. Jurnal Media Administrasi, 3 (1).
- Lubis, S.M Hari & Huseini, Martani. 1987. *Teori Organisasi: Suatu Pendekatan Makro*. Jakarta: Pusat Antar Universitas Ilmu-Ilmu Sosial.
- M. Iqbal Hasan, 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Marimin, et al. 2016. *Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bogor: Grasindo.
- Mukarom, Laksana Muhidin. 2016. *Membangun Kinerja Pelayanan Publik*. Bandung: Pustaka Setia
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Patilima, 2005. *Teknik Analisis Data*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Peraturan Gubernur Provinsi Bali No.53 Tahun 2021 tentang Satu data Indonesia Tingkat Provinsi
- Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia

- Prihantoro, Edy., Mukodim, Didin., & Ohorella, Noviawan Rasyid. (2021). *Policy Analysis the Implementation of Electronic-Based Government System (SPBE) in the City Government of Depok in Realizing an Open, Participative, Inovative and Accountable City Government. Thecnium Social Sciences Journal*, 19 (221-234).
- Ratminto & Atik Septi Winarsih. 2005. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Robbins, P. 2008. *Perilaku Organisasi, Jilid I dan II, alih Bahasa: Hadyana Pujaatmaja*. Jakarta: Prenhallindo.
- S.P. Siagian 2016. *Indikator Efektivitas*. Edisi Revisi. jakarta: PT. bumi aksara
- Saputra, Oktaf Tegar. (2022). *Pengelolaan Website Semarang Satu Data (SEMARTATA) Sebagai Wujud Keterbukaan Informasi Publik di Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah*. Diploma Thesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri
- Satu Data Indonesia. Diakses dari <https://data.go.id/home> pada 15 September 2023
- Sinambela, Lijan Poltak. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sondang P. Siagian. 2014. *Teori Administrasi Publik*. bandung: Alfabeta
- Steers, Richard. M. 2003. *Organization Effectiveness, A Behavioral View, Good Year Publishing Company*. Terjemahan oleh Magdalena Jamin, Jakarta Erlangga.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: CV Alfabeta
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*, 33. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Suma Vally, K., & Hema Divya, K. (2018). A Study on Digital Payment in India with Perspective of Consumers Adoption. *International Journal pf Pure and Applied Mathematics*, 118 (24).
- Syahrudin., Jalan, Nur., Laiyan, David. 2023. *Community Adaptation in Facing the Digital Governance. Thecnium Social Sciences Journal*, 49 (393-399).
- UU No.04 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial
- UU NO.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja